

'COBLOSAN' DITETAPKAN 27 NOVEMBER

KPU Yogya Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024

YOGYA (KR) - Beriringan dengan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, KPU Kota Yogya juga mulai melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Salah satunya melayani pendaftaran pemantau Pilkada Kota Yogya yang sudah dibuka sejak Selasa (27/2) lalu.

Ketua KPU Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 masih akan dibuka hingga 16 November 2024 mendatang. "Pendaftaran bagi pemantau memang cukup panjang untuk memberikan waktu bagi lembaga yang memang ingin melakukan kegiatan pemantauan," ungkapny saat ditemui di sela proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat Kota Yogya di Hotel Tara Yogyakarta Jalan Magelang, Rabu (27/2).

Pendaftaran pemantau pilkada tersebut dilayani di Kantor KPU Kota Yogya. Persyaratannya antara lain berbadan hukum, bersifat independen serta memiliki sumber dana yang jelas. KPU Kota Yogya juga su-

dah membuka layanan helpdesk yang akan membantu bagi lembaga pemantau yang hendak mendaftar.

Menurut Harsya, sejauh ini ada dua lembaga yang berpotensi menjadi pemantau pilkada. Akan tetapi pihaknya masih menunggu penerimaan berkas pendaftarannya. "Bagi yang mendaftar nanti akan kami periksa berkasnya. Terutama untuk melakukan akreditasi sesuai cakupan wilayahnya," tandasnya.

Teknis pendaftaran pemantau untuk pilkada diakuinya cukup berbeda dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden sebelumnya. Jika pada Pemilu 2024 kemarin lembaga pemantau menjadi kewenangan Bawaslu namun untuk Pilkada digeser ke

KPU. Hal itu bukan menjadi persoalan karena kegiatan pemilu dapat dipantau oleh semua pihak sepanjang telah mendapat lisensi dari penyelenggara.

Di samping itu ada beberapa aturan lain yang ikut berubah jika dibanding Pemilu 2024. Salah satunya penegakan terhadap pelanggaran berupa money politics atau politik uang. Jika dalam Pemilu 2024 kemarin yang dijerat ialah pihak pemberi, sedangkan pada Pilkada 2024 nanti bukan hanya pemberi melainkan juga penerima. "Ini menjadi pencermatan kami yang harus segera disosialisasikan, karena baik pemberi dan penerima politik uang dalam Pilkada 2024 tidak bisa lepas dari hukum. Semua akan kami proses," tandasnya.

Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 terkait jadwal dan tahapan Pilkada 2024, proses coblosan atau pemungutan suara sudah ditetapkan pada 27 November 2024 mendatang. Kemudian di-

lanjutkan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hingga 16 Desember 2024. Sedangkan penetapan kepala daerah terpilih menyesuaikan ada atau tidaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi juga berharap agar berbagai pihak di Kota Yogya mulai menyiapkan gelaran Pilkada 2024. Meski tahapannya beririsan dengan rekapitulasi suara Pemilu 2024 namun dipastikan tidak akan menjadi hambatan. "Tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil suara Pemilu 2024 juga hanya menyisakan satu tahap saja yakni penetapan. Artinya Pilkada 2024 harus segera kita siapkan," katanya.

Sementara itu, terkait rekapitulasi hasil suara Pemilu 2024 tingkat Kota Yogya ditargetkan sudah bisa dirampungkan pada Kamis (29/2) hari ini. Sesuai kewenangannya, KPU Kota Yogya hanya berhak menetapkan atas hasil pemilu legislatif untuk DPRD Kota Yogya. **(Dhi)-f**

SD Muhammadiyah Sapen Gelar 'Sapen International Supercamp #3'



KR-Devid Perna

Pembukaan Sapen International Supercamp #3.

YOGYA (KR) - SD Muhammadiyah Sapen kembali menggelar perkemahan 'Sapen International Supercamp #3' yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Rama Shinta, kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, 27-29 Februari 2024. Perkemahan tersebut diikuti peserta/siswa dari SD Muhammadiyah Sapen, sekolah-sekolah Muhammadiyah dari berbagai provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Peserta dalam negeri yakni sekolah dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua. Sedangkan dari luar negeri, 5 sekolah di Malaysia yaitu SK Seksyen 9 Shah Alam, SK Olak Lempit Kuala Langat, SK Sri Langat Banting, SK Sungai Kelambu Kuala Langat, dan SK Alam Megah 3 Shah Alam.

"Cakupan peserta Sapen International Supercamp terus kita diperluas, sehingga semakin banyak sekolah-sekolah di Asia Tenggara yang berpartisipasi" terang Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Agung Rahmanto kepada KR, Rabu (28/2).

Saat upacara pembukaan Sapen International Supercamp #3, Selasa (27/2), selaku pembina upacara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori. Dalam amanatnya ia menyambut baik terseleenggaranya kegiatan ini.

Menurutnya, Sapen International Supercamp #3 dapat memperkuat ukhuwah dan kebersamaan antarpeserta. Selain itu menguatkan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang tangguh.

"Melalui kegiatan ini akan terpupuk semangat cinta terhadap bangsa dan negara juga cinta kepada orang tua. Tak ketinggalan akan terbentuk karakter berintegritas, kemandirian pada anak dan peduli terhadap sesama," kata Budi Asrori.

Pembukaan Sapen International Supercamp #3 yang mengusung tema 'Spirit of Global Collaboration and Diversity' ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta dilanjutkan penyematan tanda peserta. Acara pembukaan semakin meriah dengan atraksi pasukan inti Qobilah Jenderal Sarbini SD Muhammadiyah Sapen.

Budi Asrori berharap, inovasi dalam penyelenggaraan Sapen International Supercamp #3 terus dilakukan dan program-program di dalamnya dibuat lebih beranekaragam. Sehingga Sapen International Supercamp di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih menarik. **(Dev)-f**

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Partisipasi Pemilih Menurun Hingga 40 Persen

YOGYA (KR) - Meski secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) DIY berlangsung tertib dan lancar, tapi untuk jumlah partisipasi pemilih di wilayah setempat mengalami penurunan sampai sekitar 40 persen. Peralnya dari 23 TPS yang melaksanakan PSU dan PSL di DIY hanya satu TPS saja yang tingkat partisipasi pemilihnya meningkat. Sementara 22 lainnya mengalami penurunan.

"Pelaksanaan PSU dan PSL pasti selalu diikuti dengan turunnya tingkat partisipasi pemilih. Bahkan berdasarkan data yang ada partisipasi pemilih mengalami penurunan sampai 40 persen. Walaupun partisipasi pemilih mengalami penurunan tapi sesuai amanat Undang-Undang harus dilakukan untuk menjaga hak masyarakat," kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

Sri Surani di Yogyakarta, Rabu (28/2).

Dikatakan, setelah pelaksanaan PSU dan PSL, KPU masing-masing kabupaten dan kota sekarang tengah melaksanakan rekapitulasi suara perhitungan hasil Pemilu 2024. Secara umum pelaksanaan rekapitulasi suara pelaksanaan rekapitulasi suara berlangsung lancar dan relatif tidak ada kendala. Adapun untuk Sleman, KPU setempat masih melaksanakan persiapan lanjutan rekapitulasi tingkat ka-

panewon baru diselesaikan. Pihaknya berharap awal bulan depan rekapitulasi tingkat provinsi bisa dilakukan.

"Kalau soal rencana rekapitulasi di DIY mudah-mudahan bisa dilakukan awal bulan ini. Karena masih harus menunggu perkembangan terbaru dari kabupaten/kota yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami berharap semua tahapan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu," ungkapnya. **(Ria)-f**

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS PERUBAHAN PERDA PENGELOLAAN SAMPAH

Dukungan Dewan Tuntaskan Masalah Sampah



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran pimpinan dewan memimpin sidang paripurna terkait perubahan perda pengelolaan sampah.



KR-Ardhi Wahdan

Unsur perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah menghadiri sidang paripurna.



KR-Ardhi Wahdan

Anggota dewan khidmat mengikuti sidang paripurna terkait perubahan perda pengelolaan sampah.

YOGYA (KR) - Tahun ini akan menjadi tonggak sejarah dalam hal pengelolaan sampah. Terutama dengan munculnya kebijakan desentralisasi penanganan sampah ke masing-masing kabupaten dan kota per April mendatang. Dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, DPRD Kota Yogyakarta pun memberikan dukungan atas rencana perubahan perda terkait pengelolaan sampah.

Bentuk dukungan disampaikan melalui pandangan umum tiap fraksi yang ada di lembaga dewan. Sebagai bagian dari alat kelengkapan, usulan eksekutif untuk merubah perda terkait pengelolaan sampah, menjadi pencermatan di masing-masing fraksi. Dukungan pun akhirnya diberikan agar dalam proses pengelolaan sampah ke depan memiliki landasan hukum yang tegas. Dengan begitu, eksekutif memiliki peran yang jelas dan terukur dalam menuntaskan persoalan sampah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putro, dalam pandangannya menyampaikan persoalan sampah menjadi ironis ketika kawasan Kota Yogya yang merupakan ikon wisata Indonesia memiliki tampil depan (ruang tamu) yang sangat bagus dan tertata berupa Bandara YIA, tetapi dapur berupa tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pengelo-

laan sampah tidak tertangani dengan baik. "Masyarakat akhirnya mengalami kebingungan ketika pemda memutuskan untuk menutup TPA Piyungan sebagai respons atas kelebihan volume sampah dan kapasitas pengelolaan sampah TPA Piyungan yang sangat terbatas. Kebijakan tersebut praktis berdampak pada tumpukan sampah yang mulai banyak ditemukan di ruang publik," urainya.

Untuk itu, melalui rencana perubahan perda terkait pengelolaan sampah maka dibutuhkan terobosan dan solusi supaya persoalan persampahan tidak menjadi sumber permasalahan dalam keuangan daerah. Peralnya, dalam perubahan perda itu dinyatakan jika pemerintah akan membiayai pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Hal ini bisa berbanding terbalik dengan semangat Kota Yogya yang melakukan branding sebagai kota pariwisata dan kota layak huni.

Sementara Fraksi PKS melalui ketua fraksinya, Triyono Hari Kuncoro, juga berharap agar beban pembiayaan kewajiban harus dihitung berdasarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah yang dilakukan dan sesuai dengan kinerja dari pihak yang mendapat pembiayaan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Demikian pula dengan aturan mengenai

kewajiban untuk memberikan BLPS kepada pihak yang menyelenggarakan pengelolaan sampah juga harus disertai dengan ketentuan akuntabilitas dan tata kelola yang ketat atas pembiayaan kewajiban tersebut agar tidak membuka ruang penyimpangan baru dari biaya pengelolaan sampah di Kota Yogya.

Di samping itu, Fraksi PKS meminta agar jika pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian pengelolaan sampah maka perjanjian kerja sama yang dibuat harus disusun secara cermat dan dipastikan agar tidak merugikan pemkot maupun masyarakat di sekitarnya. "Rambu-rambu untuk pembuatan kerjas ama ini harus dibuat agar kerja sama yang dilakukan dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Yogya," katanya.

Sedangkan Fraksi NasDem juga memberikan dukungan terkait perubahan perda karena setahun terakhir masalah sampah menjadi persoalan pelik. Ketua Fraksi NasDem Sigit Wicasono menilai tahapan pengelolaan sampah Kota Yogya meliputi kegiatan pemadatan, pengompasan, daur ulang materi atau energi. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan pemerintah daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain terkait. "Kami dari Fraksi Partai

NasDem mengusulkan pada Pemkot Yogyakarta agar memaksimalkan proses kerja sama pihak lain supaya pengelolaan sampah Kota Yogya ke depan berjalan dengan rapi dan tidak mengalami dinamika teknis lapangan," katanya.

Senyampang dengan itu, Ketua Fraksi PAN Indaruwanto Eko Cahyono, sangat setuju jika pemerintah kota mulai berbenah dengan membangun infrastruktur pengolahan sampah mandiri. Kebijakan desentralisasi dalam hal penanganan sampah juga harus dilihat sebagai langkah positif untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga pemkot perlu membuka peluang sebesar-besarnya kepada LSM dan komunitas untuk bisa terlibat.

Fraksi PAN juga memandang terdapat kepastian hukum sekaligus tantangan. Salah satunya menyangkut pembiayaan dalam hal ketersediaan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur dan operasional pengolahan sampah di Kota Yogya. Begitu pula terkait kesulitan dalam menemukan lahan yang cocok untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di daerah perkotaan. Sehingga perlu adanya pendampingan dan bantuan dari Pemda DIY kepada Kota Yogya yang masih memiliki keterbatasan. **(Dhi)-f**